

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan; Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002).

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999).

_____, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007).

_____, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 2008).

Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia: 2012).

Iga Gangga Santi, *Kebijakan Pertanahan di Indonesia* ,(Semarang :Undip Press, 2018).

Jayadi Setiabudi, *Panduan Lengkap Mengurus Tanah Rumah Serta Segala Perizinannya* ,(Yogyakarta: Buku Pintar, 2013).

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet 7, (Bandung: Mandar Maju, 1996).

Mudakir Iskandar Syah, *Panduan Mengurus Sertipikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, (Jakarta : Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2019).

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung: Alumni, 1991).

Sarjita, *Teknik & Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan* ,(Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka, 2005).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI Press, 2007).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. Ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2013).

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2008).

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Semarang Nomor: 86/G/2014/PTUN.Smg.

C. Internet

Arisaputra, Muhammad Ilham, Muhammad Ashri, Kasman Abdullah, and Dian Utami Mas Bakar. Akuntabilitas Administrasi Pertanahan dalam Penerbitan Sertifikat. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 2 (2017): 276-291.

KBBI Daring, s.v. “kamus”, diakses 05 November 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanah>.

Prasetyo Aryo Dewandaru, Nanik Tri Hastuti, Fifiana Wisnaeni. 2020.
*Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Gand di Badan
Pertanahan Nasional*. Jurnal Mahasiswa S2 Hukum UNDIP, Vol 13.
No 1.